

2023

LAPORAN KINERJA KECAMATAN PATTALLASSANG



BAB I

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Pattallassang.



Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kantor Kecamatan Pattallassang. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Kantor Kecamatan Pattallassang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Pattallassang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.



B. Gambaran Umum Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pattallassang

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa. Berdasarkan peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Pattallassang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Rincian Tugas sebagaimana tersebut di atas dirinci sebagai berikut :

1. memvalidasi perumusan kebijakan strategis kecamatan berdasarkan dokumen perencanaan daerah yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat;
3. mendistribusikan dan membagi tugas kepada Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing agar pelaksanaan tugas menjadi lancar;
4. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan tugas menjadi lancar;
5. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan;
6. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan yang berlaku agar tercipta kenyamanan lingkungan masyarakat;
7. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berdasarkan standar operasional prosedur agar meningkatkan ketertiban umum;
8. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan peraturan yang berlaku agar meningkatkan pelayanan lebih berkualitas;
9. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan sekretaris kecamatan dan kepala seksi di tingkat kecamatan berdasarkan pedoman yang berlaku sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan;



10. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan berdasarkan dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional desa dan/atau kelurahan;
11. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan berdasarkan peraturan Bupati sebagai peningkatan pelayanan ke masyarakat;
12. mengelola perizinan yang menjadi kewenangan Camat berdasarkan peraturan dan keputusan Bupati agar pelayanan lebih berkualitas;
13. membina kedisiplinan dan menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan kecamatan berdasarkan standar dan prosedur yang berlaku agar pengembangan karier dan peningkatan efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara;
14. memvalidasi bahan – bahan usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan sebagai bahan penyusunan rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten agar tercipta pemerataan pembangunan;
15. memvalidasi bahan - bahan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan kecamatan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja kecamatan;
16. mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan meliputi pelayanan administrasi umum, kehumasan, keprotokoleran, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan ketentuan sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja kecamatan;
17. mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan agar penetapan target kinerja dapat dicapai;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

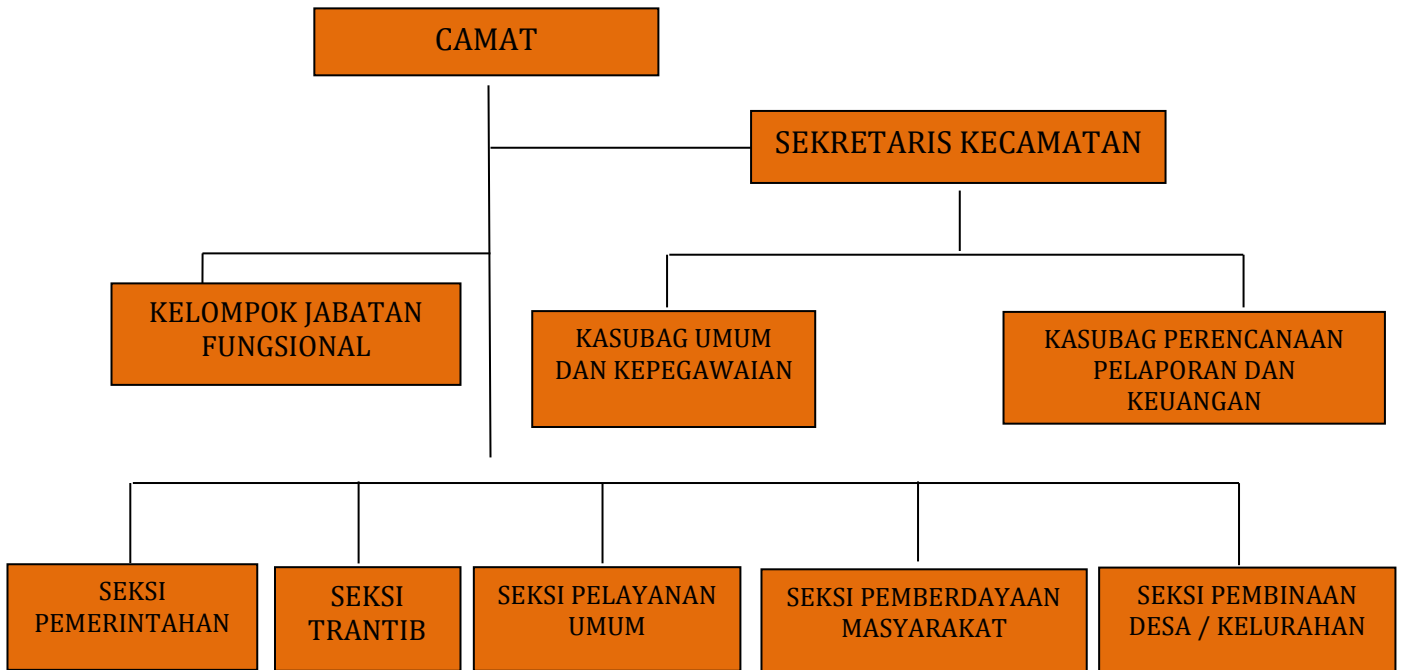
Struktur Organisasi



Kantor Kecamatan Pattallassang terdiri atas Camat Pattallassang sebagai pimpinan SKPD, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Pembinaan Desa/ Kelurahan, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian serta staf. Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pattallassang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa
(Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016)



KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa memiliki pegawai sebanyak 17 orang. Dari jumlah tersebut 10 orang di antaranya pegawai kecamatan dan 7 orang Sekertaris Desa. Jumlah pejabat eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, pejabat Eselon IV sebanyak 8 orang terdiri dari pejabat Eselon IVa sebanyak 4 orang (4 kepala seksi di kecamatan) dan pejabat eselon IVb sebanyak 2 orang (2 kasubag di sekretariat kecamatan) dan fungsional umum (pelaksana) sebanyak 2 orang yang terdiri dari 7 orang fungsional umum kecamatan dan 7 orang fungsional umum Sekkertaris Desa.

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan



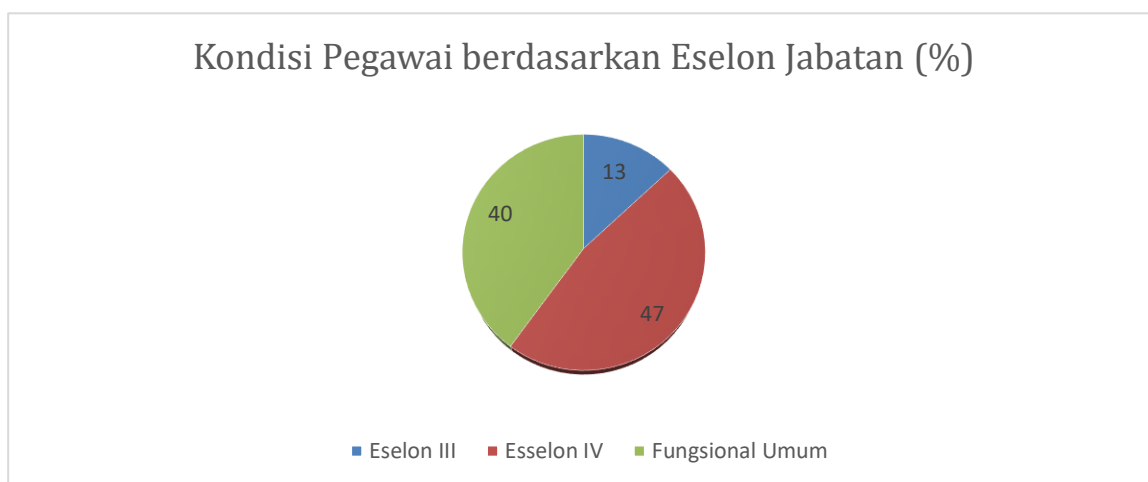
Berdasarkan eselon jabatan, Kantor Kecamatan Pattallassang terdiri atas 2 orang yang menduduki jabatan eselon III, 6 orang menduduki jabatan eselon IV dan fungsional umum sebanyak 9 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Umum	Jumlah
1.	Kecamatan Pattallassang	-	-	2	7	6	15
	Persentase (%)	0	0	13	47	40	100

Gambar 1.2

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan



Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan Ruang

Kondisi kepegawaian berdasarkan golongan ruang pada Kantor Kecamatan Pattallassang terdiri atas: golongan III sebanyak 10 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang dan golongan II sebanyak 6 orang, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Uraian	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
-----	--------	-------------	--------------	-------------	------------	--------



1.	Kecamatan Pattallassang	1	9	5	-	15
Persentase (%)		6	37	33	-	100

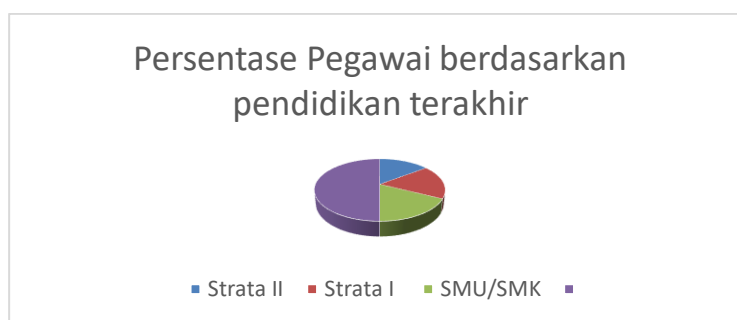
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan pendidikan terakhir, Kantor Kecamatan Pattallassang terdiri atas 5 orang pada Strata II (S2), 5 orang pada Strata I (S1), seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	Strata II	Strata I	Diploma II/III	SMA/SMK Sederajat	Jumlah
1.	Kecamatan Pattallassang	3	7	-	5	15
Jumlah		3	7	-	5	15
Persentase (%)		27,77	38,88	-	33,35	100

Gambar 1.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

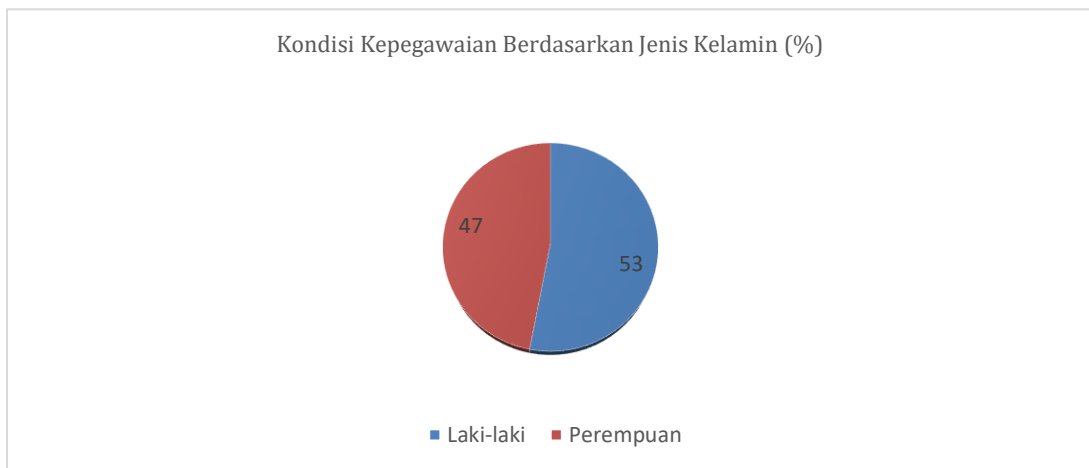


Kondisi kepegawaian berdasarkan jenis kelamin pada Kantor Kecamatan Pattallassang terdiri atas 6 orang laki-laki dan 4 orang pegawai perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kecamatan Pattallassang	8	7	15
	Jumlah	8	7	15
	Persentase (%)	53	47	100

Gambar 1.5



C. Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Pattallassang selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pattallassang 5 (lima) tahun ke depan diantaranya tertuang dalam Isu-Isu strategis kecamatan.

Isu Strategis yang dihadapi Kantor Kecamatan Pattallassang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan, dapat diidentifikasi menjadi 5 (lima) klasifikasi permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Pattallassang dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan yaitu:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Pattallassang kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran yang belum memadai
 2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Pattallassang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan
 - Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat.
 - Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan desa dikarenakan Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Pattallassang selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis



Kecamatan Pattallassang Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D. Strategi Organisasi

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Kecamatan Pattallassang berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Pelayanan Publik sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

a. Bidang Sekretariat .

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Pattallassang kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19;
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Pattallassang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

b. Bidang Pemerintahan .

Strategi yang dilakukan Kecamatan Pattallassang dalam meningkatkan kinerja di bidang Pemerintahan dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Aspek internal, Kecamatan Pattallassang melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.

c. Bidang Pelayanan Publik.

Strategi yang dilakukan pada bidang pelayanan public, yaitu : Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja seperti ketersediaan alat dan sarana pendukung pekerjaan seperti : Komputer, printer dan meubelir. Selain itu, data dan informasi berkaitan dengan Kecamatan Pattallassang. Dan hal yang paling penting adalah pembinaan budaya organisasi ke arah birokrasi yang profesional. Kedua, pada aspek proses, Kecamatan Pattallassang melakukan monitoring dan evaluasi



secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk hal kekurangan personel Pemerintah Kecamatan telah melakukan pemetaan kekurangan pegawai dan kebutuhan pegawai kepada BKPSDM lewat penyusunan Bezetting Kec. Pattallassang, pemerintah Kecamatan juga telah mengalokasikan penganggaran jaringan internet untuk mengatasi jaringan internet yang sering bermasalah

d. Bidang Keamanan dan ketertiban Umum

Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat. Koordinasi dengan Linmas se kecamatan Pattallassang, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



Tabel

Matrix Permasalahan/ Identifikasi Resiko Kecamatan Pattallassang

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	resiko			Sebab			Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Resiko	Rencana Tindak Lanjut
			Uraian	Kode resiko	Pemilik	uraian	sumber	C/UC	Uraian	Pihak Terkena				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	NILAI SAKIP												
	Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan													
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Pengelolaan data pemerintahan umum dan pengelolaan data pemerintahan yang kurang optimal	RSP 1	Camat/ Kasi	Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data pemerintahan	Internal	C	Pengelolaan data kependudukan belum optimal	Pengguna layanan	2	2	4	Penambahan personil pengelolaan data



2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kurangnya personil Pada bidang pelayanan	RSP 2	Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Kurangnya personil Pada bidang pelayanan sehingga masih terhambatnya pelayanan public di kecamatan Pattallassang	Internal	C	terhambatnya kecepatan penyelesaian pelayanan	Aparat/masyarakat	2	2	4	Penambahan personil pada bidang pelayanan
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Lambatnya respon aparatur desa dalam setiap permasalahan yang ada di desa			adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu	Eksternal	UC	Laporan yang selalu lambat	Aparat/masyarakat	2	2	4	koordinasi dengan OPD terkait yang lebih intens
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat												
	Tujuan 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik		Terkadang terjadi keterlambatan Penandatanganan berkas pengguna layanan baik secara manual maupun TTE		Pimpinan dan staf pelayanan	Adanya kendala teknis seperti pada TTE jaringan kurang bersahabat Pimpinan yang kadang sedang Dinas Luar		C	Jaringan kadang bermasalah Pimpinan Tidak ada ditempat	Pengguna layanan	2	2	2	Pembaharuan Jaringan Internet Berkas yang sifatnya Urgent diantar langsung ke pimpinan jika sedang dinas luar Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala



4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Terhambatnya percepatan pelayanan publik	RSP 4	Camat	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Pattallassang kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19;	Internal	C	Belum bisa memenuhi kepuasan maksimal masyarakat terhadap pelayanan	Aparat/m asyarakat	2	2	4	Melaksanakan evaluasi dan koordinasi dengan tim kecamatan dan unit kerja terkait
---	---	--	---	-------	-------	--	----------	---	---	-----------------------	---	---	---	---



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pattallassang Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Kecamatan Pattallassang Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

A. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Pattallassang Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Misi ke 4, Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas. tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021–2026 yaitu:

- Misi ke.... : 4 - Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.**
- Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien**
- sasaran : - Meningkatkan kualitas pelayanan publik**
- Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Kecamatan Pattallassang sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan Fungsi Penunjang menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pattallassang di antaranya adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan



Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2023	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	NILAI SAKIP	BB Sangat	BB Sangat	BB Sangat	A Sangat	A Sangat
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.50 Persen	88.60 Persen	88.70 Persen	89 Persen	90 Persen

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pattallassang tersebut dalam tabel diatas yang kemudian dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pattallassang, terjadi perubahan sasaran yang awalnya 3 sasaran menjadi 2 sasaran dikarenakan sasaran Meningkatnya persentase kategori desa cepat berkembang bukan menjadi kewenangan pemerintah kecamatan tetapi menjadi kewenangan dinas lain yang terkait dengan desa.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Kecamatan Pattallassang sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

sedangkan arah kebijakan Kecamatan Pattallassang untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan standar operasional produk dan standard pelayanan publik
2. Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan dan Keuangan



C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Kecamatan Pattallassang adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Kecamatan Pattallassang pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Badan / Dinas ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kecamatan Pattallassang Nomor 410/30/KPTL/IX/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Indikator Utama Kecamatan Pattallassang. Adapun indikator kinerja utama Kecamatan Pattallassang yaitu :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN				
			2023	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	BB Sangat	BB Sangat	BB Sangat Baik	A Sangat Baik	A Sangat Baik
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.50 Persen	88.50 Persen	88.70 Persen	89 Persen	89.0 Persen

Guna mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam IKU pada tabel tersebut diatas kecamatan Pattallassang terus menerus melakukan upaya perbaikan kinerja dan koordinasi-koordinasi dengan pihak terkait. Dalam hal upaya perbaikan kinerja kecamatan Pattallassang berupaya agar setiap aparat memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya di kecamatan Pattallassang, hal ini diwujudkan dalam perjanjian kinerja dan pernyataan kinerja pada setiap jenjang.



D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci Indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pattallassang Tahun 2023

Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.361.602.836

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,60	-	-



Terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama dari tiga sasaran menjadi dua sasaran berdasarkan SK Perubahan Indikator Utama, tanggal 10 Agustus 2023, Nomor : 410/73.A/KPTL/VIII/2023

E. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja pada kantor Kecamatan Pattallassang ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

Dari standar penilaian diatas data disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Pattallassang, tercapai/berhasil

Karena rata-rata capaian kinerja dikecamatan Pattallassang rata-rata 100 %.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021- 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.



Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KETERANGAN
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	BB	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada lembar hasil penilaian (LHE)
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai IKM	88,60	88,748	100,16 %	

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator rata rata telah mencapai target seperti yang telah diperjanjian, walaupun ada yang mengalami penurunan pada sasaran strategis Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pos pelayanan public jika dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 100,11% sekarang capaiannya menjadi 100,16 persen, berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan kecamatan Pattallassang hal ini dikarenakan



kurangnya personil pada bagian pelayanan public. Untuk Indikator Kinerja Nilai SAKIP tahun 2023 menunggu LHE dari Tim Evaluator.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA						CAPAIAN KINERJA						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	BB	BB	BB						BB	BB	Tidak ada			
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai IKM	88,41	88,52	88,52	88,748					100,2	100,11	100,16			

Pengukuran kinerja dari tahun 2023 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

a. Sasaran strategis : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Indikator kinerja 1 : Nilai Sakip, untuk tahun lalu target kinerja SAKIP telah tercapai, begitu juga untuk tahun 2022 Nilai SAKIP kecamatan Pattallassang mendapatkan Nilai BB dengan Nilai 74,00 dan untuk tahun 2023 nilai SAKIP belum ada data dari Evaluator

b) Sasaran strategis : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik

a. **Indikator kinerja 2** : Nilai IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pattallassang melalui Survey Kepuasan Masyarakat



yang dilakukan secara manual setiap akhir tahun menunjukkan tingkat Kepuasan masyarakat yang bernilai sangat baik, yang artinya telah melampaui target yang di perjanjikan yaitu 88,748%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun.... dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rensta

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja					
			2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip	A	BB	BB	Belum ada			
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai IKM	89,50 %	88,52	88,62	88,748			

Realisasi Kinerja jika disandingkan pada Target jangka menengah RENSTRA 2021-2026, dapat diyakini memiliki peluang untuk mencapai target jangka menengah, tentu saja akan dilakukan langkah-langkah perbaikan kinerja secara terus-menerus guna mewujudkan target jangka menengah Organisasi.



4. **Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya**

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2023	2023	2023
1	2	2	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	NILAI SAKIP	-	-	-
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	88,748 %	-	-

- 1). Tidak terdapat Standart Pelayanan Minimal pada kantor kecamatan Pattallassang

5. **Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.**

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.



Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (rata2 capaian indikator sekitar 100%) sesuai yang diperjanjikan dan indicator kinerja dapat dicapai dengan maksimal
 - a. Indikator 1 : Nilai SAKIP (**Berhasil**) telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu BB, tapi kami menggunakan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dikarenakan untuk lembar hasil evaluasi (LHE) tahun 2023 masih sementara proses penilaian di Inspektorat
 - b. Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (**Berhasil**) telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu 88,60 % dan capaian 88,748 %

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pada kantor kecamatan Pattallassang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.5

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	BB	BB	100				
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,60%	88,748%	100,16%	1.361.602.836	1.287.610.154	94,57%	94,57%

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif
< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat



dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Nilai Sakip dengan capaian kinerja 100% (data tahun 2022) dan capaian anggaran 94,57%, dan efektifitas penggunaan dana sebesar 94,57%
- 2) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 100,16% dengan tanpa adanya penganggaran, menunjukkan walaupun tidak ada anggaran akan tetapi Kecamatan Pattallassang mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel. 3.6

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	NILAI SAKIP	100%	93,98%	100%	Perbaikan Mutu Laporan Kinerja dan Dokumen Perencanaan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,60	88,748	100,16%	Perbaikan Pelayanan dan Survey berkala per Triwulan

Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Indikator 1 :

Nilai SAKIP, dengan target BB Belum dapat dipastikan karena nilai SAKIP belum keluar. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah

Sasaran 2 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik



Indikator 1 :

Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target 88,60 telah **berhasil** tercapai sebesar 88,748% atau tercapai 100,16%.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2) **Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pattallassang pada tahun 2023 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah Meningkatkan Kualitas pelaporan kinerja agar Nilai Sakip dapat mencapai target yang telah ditetapkan

Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah melakukan survey IKM per triwulan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait Kepuasan masyarakat pada semua layanan yang ada dikantor kecamatan

B. Realisasi Anggaran.

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 94,57% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.7

Realisasi Anggaran Kecamatan Pattallassang Tahun 2023



No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	Sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.361.602.836	1.383.169.366	94,57
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.245.025.646	1.266.592.173	94,09
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.245.025.646	1.171.474.554	94,09
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.943.190	103.943.100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.411.690	16.411.600	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.531.500	87.531.500	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.634.000	12.192.500	96,51
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.634.000	12.192.500	95,51
	TOTAL	1.361.602.836	1.383.169.366	94,57

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran kecamatan Pattallassang tahun 2023 sangat baik hampir keseluruhan realisasi anggaran telah mencapai 100 %, hanya pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak terserap 100%, hanya **94,57%** dikarenakan untuk kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN termasuk didalamnya TPP tidak bias dipastikan secara tepat besaran yang harus dibayarkan dikarenakan adanya perubahan struktur pegawai seperti : mutasi, kenaikan pangkat dan pensiun. Namun secara keseluruhan realisasi anggaran kecamatan Pattallassang bernilai sangat baik (**94,57%**)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Dari hasil analisis capaian organisasi dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja kantor kecamatan Pattallassang dapat disimpulkan :

- Target kinerja kecamatan Pattallassang untuk sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan Indikator Nilai SAKIP, belum dapat diukur karena belum adanya hasil evaluasi dari inspektorat.
- Target kinerja kecamatan Pattallassang untuk sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), telah mencapai target yang telah diperjanjikan yaitu 88,60 Persen bahkan yang realisasinya melebihi target yang diperjanjikan yaitu 88,748 % dengan capaian 100,16 %
- Realisasi Anggaran masih ada yang belum tercapai 100 persen, pada kegiatan Administrasi Keuangan dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang capaian kinerjanya hanya 94,09 Persen, hal ini disebabkan karena adanya ketidak pastian jumlah gaji ASN

B. Langkah perbaikan kinerja

Langkah yang dapat dilakukan dalam hal perbaikan kinerja kantor kecamatan Pattallassang kedepan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pada Indikator Nilai SAKIP akan dilakukan perbaikan laporan Kinerja dan dokumen perencanaan Kinerja
- Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat akan dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat per Triwulan agar peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Pattallassang lebih terukur.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Pattallassang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Hasil Penyusuna LAKIP ini akan memberikan gambaran tentang kinerja Aparatur Kecamatan Pattallassang baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Pattallassang 2021-2026 menuju pada



tercapainya Misi ke 4, Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas. Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja kebijakan dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita, cita dan harapan Pemerintah dan masyarakat.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja kebijakan dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita, cita dan harapan Pemerintah dan masyarakat.

Pattallassang, 21 Februari 2024

CAMAT



A. PANGERAN ZUBAIR, SE

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19760108 200604 1 010



